

## Di Boyolali Cakupan Layanan Vaksinasi Menyentuh 72 Persen

**BOYOLALI (KR)** - Cakupan layanan vaksinasi Covid-19 sudah menyentuh 72% dari total penduduk Kabupaten Boyolali yang layak vaksinasi. Sementara cakupan vaksinasi untuk kaum lansia mencapai 52%. Hal itu disampaikan Bupati Boyolali M Said Hidayat kepada wartawan, Jumat (15/10) siang, usai bertemu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang melakukan road show di Pendapa Kabupaten Boyolali. "Kita tinggal terus bergerak, ditambah dukungan BKKBN, maka gerakan vaksinasi akan jauh lebih cepat dan daya dukung ruang gerak masyarakat jauh lebih baik ke depan," ujar Said Hidayat.

Walau vaksinasi di Boyolali sudah mencapai 72% dan PPKM sudah turun ke level 2, dalam pelaksanaan vaksinasi, Pemkab Boyolali tetap menaati protokol kesehatan (prokes). Kepala BKKBN menyampaikan bahwa Kabupaten Boyolali mendapat bantuan dari BKKBN sebesar Rp 6,5 miliar untuk program vaksinasi Covid-19 bagi keluarga dan program pendampingan keluarga untuk percepatan penurunan stunting.

Selain gerakan vaksinasi Covid-19 bagi keluarga yang bakal menasar 22.000 orang, Pemkab Boyolali juga menggiatkan program pendampingan keluarga untuk lebih mempercepat penurunan prevalen-



KR-Rini Suryati  
**Kepala BKKBN Hasto Wardoyo bertemu Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat di Pendapa Kabupaten Boyolali.**

si stunting. Saat ini persentase kasus stunting di Kabupaten Boyolali pada Februari 2021 tercatat 8,7 persen. Capaian ini di bawah nasional yang di 2019 berada di level 27 persen.

"Jangan ketika kita menyelesaikan masalah Covid-19, tetapi abai dengan persoalan yang lain. Ini juga (pendampingan keluarga) sangat penting karena menyangkut generasi ke depan yang lebih hebat," urai Said Hidayat. Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, berharap pemerintah kabupaten dan kota memiliki perangkat Penyuluh Lapangan

Keluarga Berencana (PLKB) non PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam menggerakkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Saat ini hanya beberapa provinsi atau kabupaten-kota yang memiliki penyuluh KB non PNS, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. "Penyuluh KB non PNS di Jateng tidak ada yang digerakkan dari pemerintah provinsi," ujar Hasto Wardoyo.

Pertemuan ini merupakan rangkaian 'road show' dua hari Hasto di Provinsi Jawa Tengah dan Jateng, dalam

rangka menyampaikan bantuan anggaran dan kegiatan BKKBN kepada pemerintah kabupaten/kota dalam program vaksinasi bagi keluarga dan program pendampingan keluarga untuk percepatan penurunan stunting. Sehari sebelumnya, Hasto telah bertemu dengan Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Pekalongan, dan Wakil Walikota Semarang.

Bagi daerah yang memiliki jumlah PLKB terbatas, Hasto berharap agar para bupati mengajukan formasi tersebut. Sehingga program Bangga Kencana hingga percepatan penurunan stunting dan vaksinasi Covid-19 bagi keluarga di daerah berjalan optimal. Mengutip data yang ada, Hasto menyebut program vaksinasi Covid-19 di Jateng berjalan bagus. Capaiannya sebesar 60 persen. Sementara cakupan lansia yang sudah divaksin di Kabupaten Boyolali terbilang cukup tinggi.

Demikian juga angka stunting di Jateng, berdasarkan data, cukup bagus. Saat ini prevalensi stunting di provinsi itu 8,7 persen, di antaranya di Solo sebesar 6 persen. Capaian ini jauh di bawah kondisi nasional yang di 2019 berada di level 27 persen. Bandingkan dengan Jawa yang beberapa kabupatennya memiliki prevalensi stunting di atas 27 persen, di antaranya Kabupaten Majalengka. **(Ati)-f**

## Provinsi Jateng Terbaik Kesetaraan Gender

**SEMARANG (KR)** - Jateng dinobatkan sebagai provinsi dengan kesetaraan gender terbaik di Indonesia. Dengan prestasi tersebut, Jateng kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini merupakan penghargaan yang keempat kalinya secara berturut-turut.

Demikian dikatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Kamis (14/10) usai menerima penghargaan. Jateng menjadi yang terbaik karena mendapatkan penghargaan kategori Mentor, yaitu penghargaan tertinggi dalam kategori Anugerah Parahita Ekapraya. Ganjar Pranowo mengucapkan sala-

mat pada semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Jateng. Ia menegaskan, pengarusutamaan gender memang menjadi fokus utama dalam pemerintahannya.

"Karena selain kodrat, tidak ada satu hal pun yang pantas untuk dipertimbangkan. Gender bukan pengha-



KR-Budiono  
**Ganjar Pranowo menunjukkan penghargaan yang diraih Jateng dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

lang meraih kesuksesan. Semua yang berdiri tegap di bawah Merah Putih, punya hak yang sama. Tidak pe-

duli apakah ia laki-laki maupun perempuan, tutur Ganjar Pranowo. Anugerah Parahita Ekapraya tahun

2020 diberikan secara langsung oleh Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Penghargaan ini diberikan pada 13 kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi dan 266 kabupaten/kota. Jateng memborong banyak penghargaan dalam gelaran itu. Selain mendapatkan penghargaan kategori Mentor, ada satu kabupaten (Rembang) yang juga meraih penghargaan sama. Sementara 12 kabupaten/kota di Jateng mendapat penghargaan kategori Utama, 13 kabupaten/kota mendapat kategori Madya dan 8 kabupaten/kota meraih penghargaan kategori Pratama. **(Bdi)-f**

## Pemkab Magelang Kejar Vaksinasi

**MAGELANG (KR)** - Jumlah warga Kabupaten Magelang yang telah divaksin dosis pertama mencapai 34.59 persen atau 356.001 suntikan. Saat ini Pemkab Magelang melalui Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Kodim 0705 serta Polres Magelang, terus menerus melaksanakan vaksinasi baik dosis pertama dan kedua, disesjumul lokasi.

"Target kami hingga akhir Oktober, bisa mencapai 50 persen masyarakat Kabupaten Magelang ter-vaksin dosis pertama. Saat ini kami

terus mengencarkan pelaksanaan vaksin disesjumul tempat. Selain dilakukan dinas kesehatan, kami juga bekerjasama dengan Polres dan Kodim 0705 Magelang," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, Jumat (15/10).

Untuk dosis kedua, lanjut Nanda, kini telah mencapai 159.355 suntikan atau 15.48 persen. Sedangkan dosis tiga, sebanyak 2464 suntikan atau 0,24 persen. "Total suntikan yang sudah kami laku-

kan, baik dosis pertama hingga ketiga, mencapai 517.820 atau 25,16 persen. Saat ini ada 1.029.210 target sasaran yang akan divaksin," jelasnya.

Sementara pada hari Jumat (15/10) ada tambahan 4 pasien terkonfirmasi baru. Tiga di antaranya berasal dari Kecamatan Ngluwar dan seorang dari Muntilan. Namun ada tambahan satu pasien sembuh, dari Muntilan. "Dengan tambahan ini, jumlah kumulatifnya menjadi 22.866 orang. Rinciannya, 32 dalam

penyembuhan, 21.726 sembuh dan 1108 meninggal," lanjutnya.

Sedang untuk pasien suspek, saat ini ada tambahan 6 pasien baru. Namun ada tambahan 4 sembuh, dari Borobudur 2 orang dan seorang dari Mungkid serta Salaman. Selain itu juga ada tambahan dua alih status terkonfirmasi. Berasal dari Ngluwar dan Muntilan. "Kini jumlah kumulatifnya menjadi 2935 orang. Terdiri dari 18 dirawat, 2342 sembuh, 69 isolasi mandiri dan 456 selesai menjalani isolasi mandiri," pungkasnya. **(Bag)-f**



KR-Thoha  
**Walikota Magelang saat menerima penghargaan WTP.**

## Pemkot Magelang Raih Penghargaan WTP

**MAGELANG (KR)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menerima piagam dan plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang Tahun 2020, Kamis (14/10). Penyerahan piagam dan plakat dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang Nurhidayat atas nama Menteri Keuangan, dan diterima Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH di Kantor Walikota Magelang.

Ditemui usai acara penyerahan piagam dan plakat, Nurhidayat mengatakan penyerahan piagam dan plakat WTP merupakan penghargaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan, yang diberikan kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk pemerintah Kota Magelang, ini merupakan yang keenam kalinya. "Kita mendapatkan gambaran bahwa pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pemerintahan untuk Kota Magelang ini sudah memenuhi ketentuan," katanya.

Kriteria WTP adalah jika sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Kriteria tersebut untuk Kota Magelang semuanya sudah terpenuhi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasional pemerintah Kota Magelang sudah baik sesuai ketentuan," jelasnya.

Oleh karena itu Menteri Keuangan, atas nama Pemerintah RI, memberikan penghargaan yang langsung ditandatangani Menteri Keuangan.

Walikota Magelang secara terpisah mengatakan predikat opini WTP sudah keenam kalinya diraih Kota Magelang secara berturut-turut. Artinya, laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan dan menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Magelang cukup baik.

Didampingi Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyo MM, Walikota Magelang berharap selanjutnya mampu mempertahankan predikat yang telah diraih. Dengan adanya WTP, harus lebih bekerja keras lagi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga anggarannya bisa efisien, efektif juga pelaporannya sudah sesuai dengan yang diharuskan pemerintah. **(Tha)-f**

## Sertijab Kapolsek Polrestabes Semarang

**SEMARANG (KR)** - Serah terima jabatan (sertijab) tiga Kapolsek di jajaran Polrestabes Semarang, berlangsung Rabu (13/10) di Aula Mapolrestabes Semarang. Selaku Irup sertijab dengan prokes ketat itu Kapolsek Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Ketiga kapolsek masing-masing Kapolsek Pedurungan dari Kompol Asfauri kepada AKP Hadi Handoko, Kapodek Semarang Timur dari Iptu Budi Antoro kepada Iptu Iwan Kurniawan dan Kapolsek Candisari Iptu Suprianto kepada Iptu Handri Kristanto. Kapolsek Kombes Pol Irwan Anwar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi dan tanggung jawab selama melaksanakan tugas.

"Perlu kita pahami bersama bahwa mutasi dilingkungan Polri adalah hal yang biasa, yang dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dan pembinaan karier," tuturnya. Diharapkan kapolsek baru agar responsif, komunikasi dengan atasan dan lain harus baik dan bagus.

Intinya pejabat harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapapun dan dituntut cepat menyesuaikan diri dengan terus meningkatkan pendekatan kepada para tokoh masyarakat di masing-masing wilayah dan tingkatkan kegiatan pencegahan covid-19 dengan cara menyosialisasikan protokol kesehatan (prokes). **(Cry)-x**

## Akprind Bantu Masyarakat Ciptakan Ketahanan Pangan

**WONOGIRI (KR)** - Desa Mojopuro merupakan salah satu desa di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Desa dengan luas 700 hektare lebih ini tergolong subur namun sayangnya air irigasi untuk pertanian desa ini sulit didapat. Tim pengabdian masyarakat Institut Sains dan Teknologi Akprind (IST-Akprind) Yogyakarta terdiri Dr Muchlis SP MSc (Ketua) dengan anggota Elyyan Setyo Arbintarso ST MSc PhD dan Ir Miftahussalam MT bersama masyarakat Dusun KRJ Desa Mojopuro bersinergi mencari solusi agar bisa mendapatkan irigasi

dari sungai pada musim kemarau. "Dengan dukungan dana Kementrian Riset Dan Teknologi/BRIN 2021 disertai dana masyarakat dan Pemkab Wonogiri kami melakukan program 'Diseminasi Tekno Ekologi Sistem Tata Air Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) di Desa Mojopuro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri'. Tujuan umum Produk Teknologi yang Diseminasikan ke Masyarakat (PTDM) ini ialah penerapan Tekno Ekologi Sistem Tata Air Sebagai Upaya Pemenuhan

Kebutuhan Air Irigasi Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat," ujar Dr Muchlis SP MSc. Menurut doktor Geologi Lingkungan lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia ini, program diseminasi teknologi memfasilitasi proses hilirisasi Tekno Ekologi Sistem Tata Air hasil riset ke masyarakat oleh IST Akprind Yogyakarta. Berkas program penerapan teknologi tepat guna (TTG) ini dan kebersamaan kampus-masyarakat-pemda maka berhasil menaikkan air dari sungai guna memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Solusi masalah air irigasi akhirnya tercapai dengan penerapan tekno ekologi sistem tata air metode MUCHRAM dan pembuatan embung AKPRINDTIRTA tadah hujan 20 buah masing-masing ukuran 2 x 3,5 meter untuk lahan pertanian serta manajemen penggunaannya. Sistem MUCHRAM merupakan sistem pengaliran air yang bekerja tidak menggunakan tenaga listrik atau bahan bakar (bensin atau minyak diesel) tetapi dapat bekerja karena dijalankan tenaga air itu sendiri, dengan memanfaatkan sejumlah besar tenaga aliran air akan bekerja menaikkan air ke tempat yang lebih tinggi maksimal 50 meter dengan panjang pipa horizontal maksimal 4.000 meter," tandas Dr Muchlis SP MSc. **(Dsh)-f**



KR-Istimewa  
**Tim Akprind dan masyarakat saat meresmikan saluran air dari sungai sampai penampungan.**

## Mimbar Legislatif

### Pentingnya Data Centre dalam Layanan Adminduk

**KOMISI A DPRD** Jateng menyoro soal pentingnya data centre (pusat data) untuk menciptakan validasi data kependudukan di Jateng. Saat melakukan pengawasan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta, juga dibahas mengenai pusat data yang ada di Pemkot Surakarta untuk pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Hal itu menjadi sorotan Komisi A DPRD Jateng karena seringkali data kependudukan tidak valid dengan fakta di lapangan.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jateng Muhammad Yunus saat melakukan pengawasan ke Dispendukcapil Pemkot Surakarta Kamis (14/10). Yunus mempertanyakan apakah Pemkot Surakarta sudah menerapkan sistem pusat data kependudukan. Untuk menghindari adanya perbedaan data, pemerintah memang harus memiliki pusat data yang bisa digunakan oleh semua instansi terkait. Dengan adanya pusat data, semua akan lebih mudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Kepala Disdukcapil Kota Surakarta



KR-Budiono  
**Muhammad Yunus**

Pramono, saat menerima rombongan Komisi A DPRD Jateng, mengakui keberadaan data centre sangat penting, karena setiap saat selalu di update. Dari data centre itu, terkait dengan pelayanan adminduk. Selain itu, dalam pelayanan kepada masyarakat petugas Disdukcapil juga tidak perlu harus melakukan tatap muka dengan masyarakat, karena semua proses pelayanan bisa dilakukan dengan sistem online, sehingga tidak perlu adanya pertemuan secara fisik. Itulah pentingnya memiliki pusat data yang selalu dilakukan updating data setiap saat.

Saat ini pelayanan Adminduk di Pemkot Surakarta juga telah menerapkan pelayanan secara online melalui aplikasi. Meski demikian Pemkot Surakarta tetap berharap adanya pendampingan dari Pemprov Jateng melalui Dinkominfo agar pengembangan teknologi informasi bisa lebih baik. **(\*)-f**  
**(Disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Jateng Muhammad Yunus kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)**